

**PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Sosiologi**

**Disusun Oleh:**

**FITA KHOIRUL UMAMI  
NIM.10720032**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FitaKhoirul Umami

NIM : 10720032

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

AlamatRumah : Gedolon, Sirahan, Salam, Magelang

No. Telepon : 08574339059

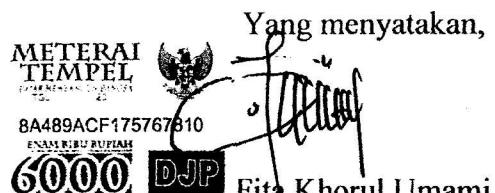
Judul Skripsi :

### **PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah murni dari hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan munaqasyah.

Yogyakarta, 2014



NIM. 10720032

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudari Fita Khoirul Umami

Lamp :-

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fita Khoirul Umami

NIM : 10720032

Judul Skripsi : "Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga".

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2014  
Pembimbing,

  
Muryanti S.sos, M.A.

NIP. 19800829 200901 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**  
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)585300; Fax. (0274)519571; email: fishum@uin-suka.ac.id  
YOGYAKARTA 55281



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/ 0757 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fita Khoirul Umami  
NIM : 10720032  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 9 Juni 2014  
Nilai Munaqasyah : 86 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang,

Muryanti, S.Sos., M.A.  
NIP 19800829 200901 2 005

Pengaji I

Ahmad Zaenal Arifin, S.Ag., M.A., Ph.D.  
NIP 19751118 200801 1 013

Pengaji II,

Ambar Sari Dewi, S.Sos., M.Si.  
NIP 19761210 200801 2 008

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Dekan,



★ Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum.

NIP 19630706 198903 1 010

## **MOTTO**

*If you want something you've never had, you must be willing to do something  
you've never done. Success is a journey, not a destination*

*Musuh kita bukan suku dan agama yang berbeda, tapi kekuasaan yang menindas*  
*(Adian Napitupulu)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Jurusan Sosiologi*

*Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Kedua Orang Tuaku*

*Keluarga besar Ikatan Keluarga Bani Ali Mursyid*

## KATA PENGANTAR

مَلَكُ الْأَرْضِ مِنْ الْجَنِّ

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab. Salah satunya yaitu penyusun dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dadi Nurhaedi, S. Ag, M. Si, selaku Kepala Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Muryanti, S. Sos, MA selaku dosen pembimbing saya, yang setia membimbing dan mengajari saya dalam membuat skripsi ini.
4. Ambar Sari Dewi, S. Sos, M. Si, selaku dosen pembimbing akademik dari semester 1 sampai 8.
5. Para dosen Program Studi Sosiologi yang telah memberikan dan berbagi ilmu kepada saya. Saya haturkan terima kasih atas semua yang diberikan dari tahun 2010 sampai 2014 ini.
6. Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), P2TPA Rekso Dyah Utami, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang telah bersedia memberikan informasinya mengenai peran yang dilakukan oleh FPKK.
7. Kepada para korban yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara dan memberikan informasi mengenai pengalamannya tentang KDRT.
8. Bapak Agus Tejo dan Ibu Siti Mu’arifah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materi dan spiritual untuk kelancaran studi saya.

Semoga Allah SWT senantiasa membala jasa-jasa dan semua yang telah diberikan kepada saya. Amin.

9. Kakek Sofingi dan Nenek Mudrikah untuk do'a tulusnya, sehingga saya sampai pada detik ini, bisa mewujudkan keinginan yang Mbah Kakung dan Mbah Putri inginkan
10. Fata Mu'min dan Reni yang setia mengantarkan saya melakukan penelitian dan dua adik saya tercinta Selly Nazulla Isnaeni dan Najwa Famila terima kasih atas perhatian dan dukungan serta do'anya.
11. Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan di kampus UIN Sunan Kalijaga yaitu Uti, Reni, Rima, Jamal, Havid, Panggah dan teman-teman di Program Studi Sosiologi angkatan 2010.
12. Keluarga di Yogyakarta, Bapak dan Ibu Kos serta seluruh warga Asrama Putri Assalam 1: Arny, Lia, Nanik, Mila, Ema, mb Nia, Intan, Rahma, Nela, Aini, Nety, Nida, Novi, dan Nisa terima kasih untuk kebersamannya selama ini.
13. Teman-teman di Rumah Singgah Anak Mandiri yang pernah saya tempati untuk PKL, terima kasih.
14. Crew dari Chelo Boutiq terima kasih telah menganggu saya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Amin. Semoga bermanfaat untuk saya dan pembaca skripsi saya ini.

Yogyakarta, 2014

Fita Khoirul Umami

NIM. 10720032

## ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Fenomena tersebut terkait dengan budaya yang dipegang teguh oleh sebagian kalangan masyarakat yang masih menganggap kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu kekurangan yang tidak perlu untuk *diexpose*, karena dianggap aib baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPKK). Forum tersebut dibentuk karena beberapa alasan. *Pertama*, perlu penanganan tuntas koordinatif dan terpadu karena masalah yang muncul saling terkait yaitu masalah kesehatan, psikologi, hukum dan sosial ekonomi. *Kedua*, bantuan tetap diperlukan walaupun masalah telah selesai. *Ketiga*, perlu anggaran yang konsisten dan yang dijamin oleh pemerintah (misalnya untuk perawatan di rumah sakit, akomodasi, konseling, pendampingan pengadilan, akte kelahiran, dll). *Keempat*, perlu rumah singgah untuk perlindungan sementara.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain; bagaimana peran FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja kendala yang dihadapi FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan landasan teori dari penelitian ini adalah tiga pilar lembaga W. Richard Scott. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan, pengurus P2TPA “Rekso Dyah Utami”, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pengurus YSI, Polda DIY. Konselor PKBI, dan korban dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini berdurasi tiga bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2014

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pada umumnya sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah DIY. Tetapi ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi yaitu dari segi sanksi bagi para anggota FPKK yang masih longgar, kemudian dari segi dukungan budaya, yaitu masih kakunya budaya masyarakat, hingga masih malu dan takut untuk melapor mengenai kekerasan yang dialami. Selain itu peran FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi oleh FPKK Antara lain Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan kasus KDRT, data yang diterima oleh FPKK belum optimal. Lembaga-lembaga anggota FPKK dalam menyerahkan data masih kurang lengkap. Kemudian upaya masyarakat yang masih menganggap bahwa membicarakan masalah pribadi atau keluarga, apalagi KDRT kepada orang lain adalah tabu atau memalukan.

*Kata Kunci: FPKK, Peran, KDRT, Tiga Pilar Lembaga*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan pustaka.....	5
E. Landasan Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Fokus Penelitian .....	15
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	15
G. Metode Pengumpulan Data .....	15
H. Metode Analisis Data .....	16
I. Sistematika Penelitian .....	17

<b>BAB II PROFIL FORUM PENANGANAN</b>	
<b>KORBAN KEKERASAN DIY .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Berdirinya FPKK.....	18
B. Visi dan Misi.....	20
C. Motto .....	21
D. Prinsip-prinsip Pelayanan .....	21
a. Prinsip Dasar.....	21
b. Prinsip Pelayanan .....	22
E. Nilai-Nilai .....	22
F. Landasan Hukum .....	22
G. Keanggotaan .....	24
a. Status Keanggotaan .....	25
b. Sifat Keanggotaan .....	25
c. Hak Anggota .....	25
d. Kewajiban Anggota.....	25
H. Program Kerja.....	26
I. Struktur Organisasi .....	28
<b>BAB III PERAN FORUM PENANGANAN</b>	
<b>KORBAN KEKERASAN DIY .....</b>	<b>30</b>
A. Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan .....	32
B. Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak .....	38
a. Sosialisasi tentang KDRT.....	42
b. Produk Hukum Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.....	43
c. Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Anak .....	44
d. Rehabilitasi Korban KDRT .....	45
C. Mekanisme Kerja Forum Penanganan Korban Kekerasan.....	46
a. Prosedur Pelayanan Standar.....	46
b. Prosedur Pelayanan Rumah Sakit .....	47
c. Prosedur Pelayanan Standar LSM.....	48
d. Prosedur Pelayanan di RPK .....	49
D. Implementasi FPKK terhadap Perempuan dan Anak.....	49

E. Kendala yang Dihadapi FPKK .....	52
a. Kendala Internal .....	53
b. Kendala Eksternal .....	54
<b>BAB IV PERANAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tinjauan Pustaka.....	9
Tabel 2 Tiga Pilar Lembaga.....	17
Tabel 2.1 Tiga Pilar Lembaga .....	58
Tabel 3 Data Korban Kekerasan Tahun 2009-2013 .....	31
Tabel 4 Jumlah Pelaku Kekerasan Tahun 2013 .....	37
Tabel 5 Anggota FPKK .....	39
Tabel 5.1 Anggota FPKK.....	74
Tabel 6 Anggota FPKK beserta Penarannanya .....	94

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi FPKK.....	28
Bagan 2 Prosedur Pelayanan Standar .....	46
Bagan 3 Mekanisme Layanan Rumah Sakit .....	47
Bagan 4 Mekanisme Layanan LSM .....	48
Bagan 5 Mekanisme Layanan di Kepolisian.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung FPKK.....	105
---------------------------	-----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang rentan dengan masalah yang sangat kompleks, seperti pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Hal ini membawa dampak yang beragam, mulai dari kesempatan kerja dan perumahan /pemukiman, peluang kerja yang semakin sempit menyebabkan peningkatan pengangguran di masyarakat. Selain itu, masalah kemiskinan yang terjadi di DIY menjadi salah satu faktor munculnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan terhadap Anak (KTA).<sup>1</sup> KDRT maupun KTA disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Diantara berbagai faktor tersebut, faktor yang mendominasi terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi. Sedangkan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) merupakan bias dari faktor ekonomi, sosial, maupun psikis.<sup>2</sup> Bias di sini adalah pelampiasan dari faktor ekonomi, sosial, dan psikis.

Tindak kekerasan yang terjadi di DIY dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mayoritas yang mengalaminya adalah perempuan. Dari beragam kekerasan yang ada, KDRT adalah yang paling dominan. Pernyataan itu berdasarkan pada jumlah data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (P2TPA) DIY. Jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut pada

---

<sup>1</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Yogyakarta, 2009).

<sup>2</sup> Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Istimewa (Yogyakarta, 2010).

tahun 2010 dan 2011 menunjukkan peningkatan, yaitu 1.305 kasus menjadi 1.166 kasus dan diantara jumlah tersebut 87 persen korban adalah perempuan.<sup>3</sup>

Peningkatan KDRT di DIY juga tercatat dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY. Pada tahun 2004, jumlah kasus KDRT tercatat sebanyak 14 kasus dan meningkat menjadi 109 kasus di tahun 2005. Pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 113 kasus, 2007 menjadi 118 kasus, 2008 sebanyak 120 kasus, 2009 sebanyak 135 kasus, 2010 sebanyak 125 kasus, 2011 sebanyak 140 kasus dan 2012 meningkat menjadi 143 kasus.<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Tetapi dari sebaran data tersebut hanya dapat dilihat sebagian kecil dari sekian tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang belum tertangani. Fenomena tersebut terkait dengan budaya yang dipegang teguh oleh sebagian kalangan masyarakat yang masih menganggap kekerasan di dalam rumah tangga merupakan suatu kekurangan yang tidak perlu untuk *diexpose*, karena dianggap aib baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di DIY sudah banyak menangani kasus KDRT. Namun kenyataannya lembaga-lembaga tersebut belum cukup untuk menangani kasus KDRT yang ada di DIY, oleh karena itu pemerintah membentuk FPKK. tersebut dibentuk karena beberapa alasan.

---

<sup>3</sup><http://edisicetak.joglosemar.co/berita/kasus-kdrt-di-jogja-melonjak-116750.html>, (Yogyakarta, Diakses: 13/11/2013 Pkl: 8:53 WIB).

<sup>4</sup>Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, 2010).

*Pertama*, perlu penanganan tuntas koordinatif dan terpadu karena masalah yang muncul saling terkait yaitu masalah kesehatan, psikologi, hukum dan sosial ekonomi. *Kedua*, bantuan tetap diperlukan walaupun masalah telah selesai. *Ketiga*, perlu anggaran yang konsisten dan yang dijamin oleh pemerintah (misalnya untuk perawatan di rumah sakit, akomodasi, konseling, pendampingan pengadilan, akte kelahiran, dll). *Keempat*, perlu rumah singgah untuk perlindungan sementara.<sup>5</sup>

FPKK bertugas untuk menangani dampak-dampak yang ditimbulkan KDRT seperti masalah pendidikan dan kesehatan. FPKK tersebut dibentuk guna melaksanakan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Tujuan umum dari FPKK, *pertama* memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. *Kedua* memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. *Ketiga* menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sasaran FPKK meliputi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender serta organisasi, lembaga dan individu yang memiliki kedulian serta kemampuan memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Profil Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, 2010).

<sup>6</sup> Profil forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana pernyataan di atas, penelitian terhadap FPKK dan Anak menarik untuk diteliti karena berbagai alasan. *Pertama*, semakin berkembangnya kasus KDRT yang berdampak pada keharmonisan keluarga khususnya di DIY. *Kedua*, FPKK merupakan sebuah forum yang ada di masyarakat yang didirikan oleh pemerintah, agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui peran dari forum, maka perlu dilakukan penelitian tentang FPKK. *Ketiga*, dapat dijadikan tolak ukur untuk organisasi lain agar memaksimalkan peran dan manfaatnya di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa saja kendala yang dihadapi FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi FPKK dalam menjalankan tugasnya.

### **2. Manfaat penelitian.**

Manfaat penelitian meliputi dua aspek yaitu:

- a. Secara Teoritis, *pertama* memberikan sumbangan bagi sosiologi gender dan sosiologi organisasi dengan memberikan informasi tentang peran yang telah dilakukan oleh FPKK kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat. *Kedua* dapat menjadi tambahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan perempuan dan KDRT.
- b. Secara Praksis, memberikan wawasan bagi peneliti, para pembaca, dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani KDRT.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tulisan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam tinjauan pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tulisan dari Wiwik Sartini dengan judul *Pelayanan “Rekso Dyah Utami”*<sup>7</sup> terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penulis meneliti tentang lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan dan anak. Peneliti lebih memfokuskan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (istri). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami”. Peran aktif daripada petugas dan korban kekerasan sendiri sangat dibutuhkan dalam optimalisasi pelayanan yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini merupakan bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh “Rekso Dyah Utami” secara khusus untuk membantu mengembalikan fungsi-fungsi keluarga secara utuh dan untuk mengembalikan hak-hak korban yang tidak terpenuhi secara umum. Pelayanan tersebut secara garis besar belum berhasil karena banyak kendala yang dihadapi salah satunya adalah kurang terbukanya korban kepada petugas dan masih minimnya pengetahuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Skripsi dari Ardian yang berjudul *Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam*

---

<sup>7</sup> Rekso Dyah Utami adalah Lembaga Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut korban KDRT. *Profil Pusat Pelayanan RDU*, (Yogyakarta, 2013).

<sup>8</sup> Wiwik Sartini, *Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta:SKRIPSI, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

*Rumah Tangga*. Fokus penelitiannya tentang peran aparat penegak hukum terhadap KDRT di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan *Field research* (penelitian lapangan), dengan permasalahan penelitiannya adalah bagaimana implementasi peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja kendala yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi peran Polda DIY telah sesuai dengan UU yang berlaku. Tetapi masih ada hal yang belum terpenuhi yaitu mengenai hak-hak korban yang belum mendapatkan bantuan hukum secara layak pada proses pemeriksaan sesuai dengan UU yang berlaku. Kemudian kendala selanjutnya yaitu pelaku kekerasan KDRT belum mengetahui bahwa KDRT itu dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kendala selanjutnya yaitu korban masih malu untuk melapor karena masih menganggap bahwa KDRT adalah aib dan harus ditutup-tutupi.<sup>9</sup>

Penelitian dari Mahmud Sofyan Jamil dengan judul *Peran Non Gonermental Organization dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta (dalam Advokasi Jaminan dan Layanan Kesehatan Bagi Orang yang Terinfeksi HIV Studi Kasus di LSM PKBI Yogyakarta)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh PKBI Yogyakarta dalam hal advokasi jaminan dan layanan kesehatan bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Yogyakarta. Subjek dari peneltian ini adalahkonselor LSM PKBI, dan yang menjadi objek adalah peran yang

---

<sup>9</sup> Ardian, *Peran Polda Daerah Istimewa Yogayakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta:SKRIPSI, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dilakukan oleh NGO dalam menanggulangi HIV/AIDS. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah peran yang dilakukan oleh LSM PKBI yaitu berupa pendampingan dan advokasi dalam berbagai hal, termasuk akses jaminan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS, NGO menjadi salah satu perantara antara pemerintah dan Masyarakat mengenai HIV/ AIDS. Namun belum terjalin koordinasi yang baik pemerintah dan NGO, sehingga peran yang dilakuakn belum maksimal, dan masih berjalan sendiri-sendiri<sup>10</sup>

Tulisan dari Umar Ariyanto Saputra yang berjudul *Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta)*. Subjek dari penelitian ini adalah para konselor Rifka Annisa Women's Crisis Center, dan yang menjadi objeknya adalah layanan konseling dari Rifka Annisa Women's Crisis Center. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Rifka Annisa dalam pananganan kasus KDRT menggunakan dua model yaitu model pendampingan untuk perempuan dan model pendampingan bagi laki-laki pelaku kekerasan. Para pekerja sosial di Rifka Annisa memiliki latar belakang pengetahuan psikologi dan hukum. Kemudian ada beberapa kegiatan atau peran yang dilakukan oleh pekerja sosial di Rifka Annisa dalam menangani klien yang terkait dengan masalah KDRT yaitu peran sebagai

---

<sup>10</sup>Mahmud Shofyan Jamil, Peran Non Govermental Organization dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta (dalam Advokasi dan Layanan Kesehatan bagi Orang yang Terinfeksi HIV/AIDS Studi Kasus di LSM PKBI Yogyakarta, (Yogyakarta: SKRIPSI, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2011).

pendamping, peran sebagai pemberdaya, peran sebagai pendidik, dan peran sebagai pembela.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, lihatlah tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Tinjauan Pustaka

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Subjek yang diteliti	Objek yang diteliti
1	Wiwik Sartini dengan judul “Pelayanan Rekso Dyah Utami terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”	Pengurus P2TPA Rekso Dyah Utami	Upaya pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh P2PTA “Rekso Dyah Utami”
2	Ardian dengan berjudul “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”	Pihak Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta	Peran yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3	Mahmud Sofyan Jamil dengan judul Peran Non Gonemental Organization dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta (dalam Advokasi Jaminan dan Layanan Kesehatan Bagi Orang yang Terinfeksi HIV Studi Kasus di LSM PKBI Yogyakarta)	Konselor LSM PKBI	Peran Non Gonemental Organization dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta
4	Umar Ariyanto Saputra yang berjudul Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta)	para konselor Rifka Annisa Women’s Crisis Center	layanan konseling dari Rifka Annisa Women’s Crisis Center

*Sumber: berdasarkan tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa skripsi*

Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang lembaga yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, metode yang digunakan untuk menangani korban kekerasan dan upaya yang harus dilakukan untuk

---

<sup>11</sup>Umar Ariyanto Saputra, Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta (Yogyakarta: SKRIPSI, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini, karena permasalahan dalam penelitian ini antara lain; bagaimana peran FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja kendala yang dihadapi FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan, pengurus P2TPA “Rekso Dyah Utami”, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan korban dari Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pada umumnya sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah DIY. Tetapi ada beberapa hal yang masih belum terpenuhi yaitu dari segi sanksi bagi para anggota FPKK yang masih longgar, kemudian dari segi dukungan budaya, yaitu masih kakunya budaya masyarakat, hingga masih malu dan takut untuk melapor mengenai kekerasan yang dialami. Selain itu peran FPKK dalam upaya perlindungan perempuan dan anak masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi oleh FPKK Antara lain Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan kasus KDRT, data yang diterima oleh FPKK belum optimal. Lembaga-lembaga anggota FPKK dalam menyerahkan data masih kurang

lengkap. Kemudian upaya masyarakat yang masih menganggap bahwa membicarakan masalah pribadi atau keluarga, apalagi KDRT kepada orang lain adalah tabu atau memalukan

### **E. Landasan Teori**

#### **Tiga Pilar Lembaga W. Richard Scott**

Penelitian tentang FPKK menggunakan teori sosiologi organisasi mengenai tiga pilar utama dari lembaga W. Richard Scott. Tiga pilar tersebut adalah regulatif, normatif dan kognitif budaya. *Pertama*, regulatif adalah peraturan yang digunakan dalam suatu lembaga yang terdiri dari kekuatan, sanksi, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga. Dengan regulatif tersebut, memungkinkan lembaga dan aksinya dalam memberikan lisensi, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga itu sendiri.<sup>12</sup> *Kedua*, normatif adalah konsepsi norma yang digunakan dalam suatu lembaga, norma merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh lembaga. Norma membangkitkan perasaan yang kuat bagi para anggota dari lembaga tersebut. Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan terhadap pengaruh stabilisasi sosial dan norma-norma yang baik yang akan diinternalisasikan kepada masyarakat. <sup>13</sup> *Ketiga*, Kognitif budaya adalah pemikiran atau pengetahuan tentang budaya dalam lembaga. Kognitif budaya

---

<sup>12</sup> W. Richard Scott, Institutions and Organizations (Ideas and interest) Third Edition, (Stanford University: sage Publications, 2008), hlm. 52

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 56

meliputi paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf<sup>14</sup>. Kognitif budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normatif. Untuk itu penelitian ini mencoba mengaitkan peran FPKK dengan kognitif budaya yang ada pada teori Scott.

Regulatif, normatif, kognitif budaya memiliki sistem yang mengidentifikasi antara satu teori sosial dengan yang lain yang merupakan bagian penting dari lembaga. Untuk lebih jelasnya tentang tiga pilar tersebut, lihatlah tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Tiga Pilar dari Lembaga

No		Regulatif	Normatif	Kognitif budaya
1	Dasar kepatuhan	Manfaat	Kewajiban Sosial	Diambil untuk memberi ijin
2	Dasar perintah	Aturan perintah	Harapan yang mengikat	Skema kemandirian
3	Mekanisme	Tersistem	Normatif	Meniru
4	Logika	Struktur lembaga	Kelayakan	Ortodok
5	Indikator	1. Peraturan 2. Hukum 3. Sanksi	1. Sertifikasi 2. Akreditasi	1. Logika keyakinan bersama 2. Isomorfisme
6	Pengaruh	Kepalsuan /kemurnian	Kehormatan /kenistaan	Kepastian /ketidakpastian
7	Dasar legitimasi	Hukum yang legal	Keteraturan moral	1. Paham 2. Pengakuan 3. Dukungan kebudayaan

Sumber: *Institutions and Organizations*, W. Richard Scott (2008)

---

<sup>14</sup> Isomorph adalah organisme yang berjenis sama tetapi dari keturunan spesies yang berbeda-beda; gejala morfologi yang timbul. Berdasarkan dari kamus ilmiah populer Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2009), hlm.283.

Tiga pilar lembaga memiliki 7 dasar yaitu *pertama*, dasar kepatuhan memiliki tiga fungsi, yaitu manfaat secara regulatif kewajiban sosial secara normatif, dan pemberian ijin secara kognitif budaya. *Kedua*, dasar perintah juga memiliki tiga fungsi yaitu aturan perintah secara regulatif, harapan yang mengikat secara normatif, dan kemandirian secara kognitif budaya. *Ketiga*, yaitu mekanisme juga memiliki tiga fungsi yaitu mekanisme secara regulatif yang tersistem, mekanisme normatif secara normatif (berdasarkan norma) dan mekanisme kognitif budaya secara meniru. *Keempat*, memiliki dasar logika, yaitu logika secara regulatif berdasarkan struktur lembaga, logika secara normatif berdasarkan kelayakan lembaga, logika secara kognitif budaya yaitu secara ortodok. *Kelima*, memiliki dasar indikator, indikator secara regulatif berdasarkan peraturan, hukum, dan sanksi. Indikator secara normatif berdasarkan sertifikasi dan akreditasi yang ada pada lembaga. Indikator secara kognitif budaya yaitu bedasarkan keyakinan bersama dan isomorfisma. *Keenam*, berdasarkan pengaruh, yaitu pengaruh lembaga secara regulatif adalah berupa kepalsuan / kemurnian, berdasarkan pengaruh lembaga secara normatif berupa kehormatan / kenistaan, dan yang terakhir pengaruh secara kognitif budaya berupa kepastian / ketidakpastian yang diberikan oleh lembaga. *Ketujuh*, dasar legitimasi, legitimasi secara regulative berdasarkan hukum yang legal, legitimasi secara normatif berdasarkan keteraturan moral pemimpin, dan legitimasi secara kognitif budaya berdasarkan dari paham, pengakuan, dan dukungan kebudayaan. Tiga pilar dari lembaga dan tujuh

dasarnya sangat berguna untuk mengetahui apakah FPKK termasuk lembaga yang baik dimasyarakat atau sebaliknya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa yaitu berupa kejadian atau fenomena gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori<sup>15</sup>. Penelitian ini berdasarkan perspektif teoritis, sementara perspektif teoritis sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.<sup>16</sup>

Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang disediakan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>17</sup> Pendekatan deskriptif ini lebih cenderung kepada pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan ini dimaksud untuk penjelajahan lapangan dan penjelasan secara menyelidik mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Pendekatan deskriptif eksploratif tidak

---

<sup>15</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung; Alfabeta, 2010), hlm. 22.

<sup>16</sup> Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), ( Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 38.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, Metode penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007, hlm. 66.

menggunakan pengujian hipotesis. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan pendekatan ini cocok digunakan dalam meneliti dan menyelidiki perilaku sebuah grup atau kelompok sosial seperti FPKK.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah Forum Penanganan Korban Kekerasan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah FPKK. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah ketua FPKK, Sekretaris P2TPA RDU, pegawai BPPM Bag. Pengolahan data, pengurus FPKK, pengurus YSI, konselor PKBI dan dua korban KDRT. Data yang ingin diperoleh dari informan adalah seluk-beluk tentang FPKK baik itu sejarah, peran dan sumbangsihnya kepada masyarakat Yogyakarta. Sedangkan objek penelitiannya adalah peran yang dilakukan oleh FPKK serta kendala yang dihadapi oleh forum tersebut.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

### **1. Wawancara mendalam**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada narasumber

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 180.

yang bersangkutan. Narasumber dalam penelitian ini adalah ketua FPKK, Sekretaris P2TPA RDU, pegawai BPPM Bag. Pengolahan data, pengurus FPKK, pengurus YSI, konselor PKBI dan dua korban KDRT.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah memperoleh data dari data-data yang bersifat sekunder. Data sekunder tersebut berupa buku catatan, buku profil, notulen rapat yang ada di FPKK.

## H. Metode Analisis Data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>19</sup> Adapun proses-proses analisis data adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Reduksi data, berupa data-data mentah yang diperoleh dari data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku profil dan catatan.
2. Penyajian data, yaitu deskripsi data mentah berupa menyederhanaan dan pembuatan narasi data dari informan FPKK, anggota FPKK dan korban KDRT yang diperoleh dari data mentah.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian terhadap peran dari FPKK, serta verifikasi data yang diperoleh dari lapangan apakah sesuai dengan apa yang ditulis oleh peneliti.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian disusun sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 333.

<sup>20</sup> Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm.22-23.

**Bab Pertama**, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sitematika penulisan.

**Bab kedua**, menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian, gambaran umum mengenai profil tentang FPKK.

**Bab ketiga**, temuan di lapangan mengenai Peran FPKK dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

**Bab keempat**, berisi analisis dan pembahasan Peran FPKK serta kendala yang dihadapi FPKK dalam menjalankan tugasnya.

**Bab kelima**, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi saran dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini juga dicantumkan lampiran-lampiran serta daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) adalah forum yang sudah memiliki tiga pilar dari lembaga dari W. Richard Scott. FPKK sejauh ini sudah berusaha menjadi forum yang berfungsi sebagai jejaring bagi lembaga-lembaga anggota. Berbagai upaya dan aksi telah dilakukan guna menangani kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kiranya semua itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi lembaga-lembaga lain dalam bekerja sama. Meskipun sampai saat ini FPKK masih banyak kekurangan, tetapi dengan adanya forum ini, dapat mempermudah kerja sama berjejaring antar anggota FPKK.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) sampai saat ini sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai wadah jejaring bagi anggota-anggota FPKK dalam menangani kasus kekerasan, tetapi dalam perjalannya FPKK banyak menemui kendala, adapun kendala secara internal dari FPKK adalah sebagai berikut; 1) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan kasus KDRT; 2) Kontak person yang bertugas sebagai humas setiap lembaga anggota FPKK sering tidak mengikuti rapat 2 bulanan sehingga informasi yang ada pada rapat tidak tersampaikan dengan tepat; 3) Pengkaderan pada

setiap lembaga anggota FPKK kurang, misalnya ada pengurus FPKK yang merupakan pekerja rumah sakit yang dimutasi dan tidak mengkader; 4) Data yang diterima oleh FPKK belum optimal. Lembaga-lembaga anggota FPKK dalam menyerahkan data masih kurang lengkap. Sedangkan kendala eksternal adalah sebagai berikut; 1) masih kurangnya kesadaran masyarakat di daerah-daerah pelosok sehingga pelaporan tentang KDRT masih belum maksimal seperti yang ada di kodya Yogyakarta dan Sleman; 2) kerjasama antar daerah masih kurang, sehingga ketika seseorang yang berKTP luar daerah, tetapi tinggal di DIY dan mengalami kekerasan hingga harus ditangani oleh FPKK, panganannya menjadi tidak maksimal.

2. FPKK merupakan forum yang memiliki karakteristik lembaga yang ada di masyarakat. Adapun alasan dari hal tersebut adalah FPKK memiliki tiga pilar lembaga yaitu regulatif, normatif, dan kognitif budaya, karena menurut W. Richard Scoot, suatu lembaga bisa disebut sebagai lembaga jika terdiri dari, regulative normatif dan kognitif budaya, tiga pilar tersebut secara bersama-sama dengan sumber daya alam dan manusia bisa memberiakan stabilitas pada kehidupan sosial. Meskipun sekarang FPKK masih mengalami kesulitan secara internal maupun eksternal, yaitu dari kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengolahan data, hingga budaya yang ada di masyarakat yang masih malu dalam melaporkan kasus kekerasan.

3. Kekurangan dari FPKK yaitu berupa sumber daya manusia yang masih mumpuni dan sangsi yang masih longgar, sehingga memudahkan anggota-anggota FPKK untuk melanggar.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti melakukan peneilitian di Sekretariat FPKK, P2TPA Rekso Dyah Utami, dan BPPM, maka peneliti berusaha memberikan saran agar dapat menjadi pertimbangan berbagai pihak kaitannya dengan peran FPKK dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa saran tersebut adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis peran FPKK dalam menangani kasus kekerasan dengan tiga pilar dari lembaga, menurut peneliti, jika tiga pilar dapat diimplementasikan secara keseluruhan, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada cara kerja dan pelayanan FPKK dan anggota-anggotanya.
2. FPKK memang mencanangkan tentang sosialisasi KDRT bersama dengan anggota-anggotanya, tetapi alangkah lebih baiknya jika FPKK juga mensosialisasikan tentang FPKK itu sendiri kepada masyarakat, agar masyarakat luas mengetahui secara lengkap tentang FPKK tersebut.
3. FPKK sudah memiliki landasan hukum yang jelas, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah DIY. Meskipun demikin, tetapi sanksi terhadap anggota FPKK yang bekerja kurang baik maupun yang melanggar masih belum jelas, untuk itu, FPKK beserta pemerintah DIY

harusnya memberikan sanksi tegas agar para anggota bekerja lebih baik dan menurut terhadap aturan yang ada.

4. P2TPA RDU, merupakan bagian dari FPKK. P2TPA RDU tugasnya adalah bertindak sebagai Unit Gawat Darurat dari FPKK, untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap pengurus-pengurus yang ada di P2TPA RDU. Perlu adanya renovasi pengurus agar kerja dan tugas-tugas berat bisa terselesaikan lebih cepat, karena yang menjadi pengurus dari P2TPA RDU rata-rata sudah memasuki usia senja, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga muda yang kompeten dan profesional.
5. Bagi penelitian selanjutnya lebih baik mendalami mengenai peran dari FPKK itu sendiri, tetapi menggunakan teori fungsional struktural Talcott Parsons mengenai empat imperatif yaitu AGIL.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. 2009. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Ardian. 2013. *Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. SKRIPSI. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Badriyah, Sri. 2010. *Layanan Konseling Islam Terhadap Remaja Islam di Luar Nikah di Rekso Dyah Utami Yogyakarta*. SKRIPSI. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Fakih, Mansour. 1996. *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam Perbincangan Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Forum Penanganan Korban Kekerasan. 2013. *Direktori Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Edisi Ketiga Tahun*. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kadurasman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan feminism*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Laila, Aminatul. 2013. *Metode Bimbingan Konseling Islam Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rekso Dyah Utami Yogyakarta*. SKRIPSI. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

- Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman (terj. Nurhadi). 2010. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sartini, Wiwik. 2009. *Pelayanan “Reksa Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. SKRIPSI. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Scott, W. Richard. 2008. *Institutions and Organizations (Ideas and interest) Third Edition*. Stanford University: sage Publications, 2008.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. .
- Sukanto, Suryono. 1998. *Talcott Parsons dan Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Sutranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan* Yogyakarta: Kanisius.
- Tim dosen Filsafat Ilmu UGM. 2001. *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty.
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Tabel 6

Tabel Lembaga yang Memberikan Layanan Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Provinsi DIY serta masing –masing Peranannya.

<b>Peran Anggota</b>	<b>Nama Aggota</b>	<b>Visi dan Misi</b>	<b>Pelayanan yang di berikan</b>
<b>Peran psikologis</b>	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU)		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi</li> <li>2. Pendampingan</li> <li>3. Rujukan</li> <li>4. Shelter</li> <li>5. Semi shelter</li> </ul>
	Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPA)	Menciptakan duia yang adil tanpa deskriminasi terutama deskriminas gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi psikologi</li> <li>2. Kegiatan pencegahan</li> </ul>
	Yayasan Sayap Ibu cabang Daerah Itimewa Yogyakarta	<p>Visi:</p> <p>Anak adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilahirkan dalam keadaan tanpa doa, dan juga tidak memikul dosa-dosa orang tuanya. Mereka berhak atas pemeliharaan dan perlindungan syah dalam kandungan dan sesudah diahirkan</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan sayap ibu mengusahakan semaksimal mungkin agar anak terlantar mendapat kesejahteraan sosial lahir dan batin, dan mendapat perlindungan hukum demi hari kemudianya.</li> <li>2. Melaksanakan usaha kesejateraan anak yang holistic, terpadu dan berkesinambungan, alam arti yang seluas-luasnya Yng bertujuan menolong anak-anak balita terlantar, dalam arti :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ada orang tuanya atau wali yang merawatnya</li> <li>b. Tidak diketahui orang tuanya atau kerabat lainnya</li> <li>c. Terlantar, dan yang karena sebab-sebab lain, perlu diberi pertolongan, segala sesuatu dalam arti yang seluas-luasnya</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Panti penyantunan balita terlantar</li> <li>2. Panti penyantunan dan rehabilitasi anak cacat ganda</li> <li>3. SLB cacat ganda daya ananda</li> <li>4. Wisma ibu, yaitu panti penanganan calon ibu dalam program pranatal</li> <li>5. Taman kanak-kanak Tumus Asih</li> <li>6. Melaksanakan pelayanan masyarakat</li> </ul>
	RIFKA ANNISA	<p>Visi:</p> <p>Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender yang tidak mentolellir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan social, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal</p> <p>Misi:</p> <p>Menorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk didalam anak-anak, lanjut usia, diffable, meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling atau konsultasi psikologis</li> <li>2. Pendampingan hukum</li> <li>3. Penyediaan rumah aman</li> <li>4. Outreach atau yang lebih dikenal dengan layanan pro aktif</li> <li>5. Konseling untuk laki-laki pelaku kekerasan</li> <li>6. Penguatan kapasitas untuk mitra eksternal</li> <li>7. Layanan konsultasi untuk beberapa</li> </ul>

		kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan.	program seperti assessment, penelitian, evaluasi atau penguatan kapasitas. Layanan perpustakaan.
	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Yogyakarta		Pelayanan rehabilitasi psikologis bagi wanita rawan sosial psikologis, wanita korban tindak kekerasan dan pekerjaan migran
	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Yogyakarta		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesejahteraan sosial</li> <li>2. Sumber data, informasi dan konsultasi kesejahteraan anak</li> <li>3. Sebagai lembaga rujukan</li> </ol>
	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Teratai” DIY (LK3 “Teratai” DIY)	<p>Terciptanya keluarga yang sehat, bahagia, sejahtera dan mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan konseling</li> <li>2. Advokasi dan pendampingan</li> <li>3. Fasilitas dan rujukan</li> <li>4. Sosialisasi dan informasi</li> <li>5. Penyelenggaran tes psikologi</li> <li>6. Penguatan ekonomi keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan</li> <li>2. Pengembangan dan pemberdayaan</li> <li>3. Perlindungan</li> <li>4. Informasi</li> <li>5. Pendampingan</li> <li>6. Rehabilitasi</li> <li>7. Rujukan</li> </ol>
<b>Peran Sosial</b>	Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>Visi: Terwujudnya masyarakat yang mandiri, berkarakter, dan berkejasahteraan sosial</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas menejemen</li> <li>2. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan komitmen masyarakat dalam meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial</li> <li>3. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial</li> <li>4. Mendayagunakan potensi, sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS yang berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.</li> </ol>	Pelayanan korban dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, pemberdayaan pekerja migran dan jaminan sosial.
	Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan DIY		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan dan pemerataan akses</li> <li>2. (APS, APK, APM, Putus sekolah, buta aksara mengulang kelas, angka melanjutkan, angka penyelesaian, dan angka bertahan)</li> <li>3. Mutu dan relevansi pendidikan</li> <li>4. Proporsi peserta didik</li> </ol>

			<p>perempuan dan laki-laki per prodi . hasil UAN, materi bahan ajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Manejemen pendidikan</li> <li>6. Proporsi perempuan dan laki-laki dalam perumusan kebijakan</li> <li>7. Proporsi perempuan dan laki-laki sebagai pendidik.</li> </ol>
	Kantor Wilayah Kementerian Agama		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang pendidikan dan pondok pesantren</li> <li>2. Bidang urusan agama islam dan syariah</li> <li>3. Bidang peneranan agama Islam dan zakat waqaf</li> <li>4. Bimbingan masyarakat katholik, kristen, hindu dan budha</li> </ol>
	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta		Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan
	Jaringan penanganan korban kekerasan Berbasis Gender dan Traficcking		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Psikologi dan spiritual</li> <li>2. Sosial dan ekonomi</li> <li>3. Hukum</li> <li>4. Kesehatan</li> </ol>
	Badan Kesejahteraan keluarga, pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPP&KB Kab. Bantul)	Bantul yang produktif dan profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, asri, sejahtera, dan demokratis Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling</li> <li>2. Pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak</li> </ol>
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) kabupaten Kulon Progo		Konseling
	Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Gunung Kidul	<p>Visi:</p> <p>Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPMPKB maka visi untuk tahun 2010-2015 adalah mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan partisipasi, kemampuan kelebagaan dan usahaperekonomian masyarakat desa</li> <li>2. Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak</li> </ol>	Advokasi dan fasilitasi

		<p>melalui peningkatan kualitas hidup, pengarusutamaan gender</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Optimalisasi norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera</li> <li>4. Memantapkan efektifitas dan efisiensi pelayanan internal dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja</li> </ol>	
	<p>Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman (BKBPMPP) Kab.Sleman</p>	<p>Visi: Menjadi lembaga andalan menuju Sleman Lebih Sejahtera tahun 2015</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menungkatkan manajeman pemerintahan dan aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas</li> <li>2. Memantapkan kesertakan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi serta meningkatkan cakupan dan sasaran program KB</li> <li>3. Percepatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sejahtera</li> <li>4. Percepatan peningkatan keadilan gender, kualitas hidup perempuan dan anak</li> <li>5. Penurunan angka kemiiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui pengoptialan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>6. Mengembangkan potensi masyarakat serta penetapan kelembagaan di pedesaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan KB</li> <li>2. Pelayanan pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak di Sleman</li> </ol>
	<p>Pusat Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak</p>	<p>Visi: Sahabat perempuan dan anak Sleman</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyadaran, pembudayaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>2. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> <li>3. Membangun penguatan di masyarakat daam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan</li> </ol>	<p>Pelayanan pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak di Sleman</p>
	<p>Badan Kordinasi Kegiatan Krsejahteraan Sosial DIY (BKKKS DIY)</p>	<p>Terwujudnya keberdayaan masyarakat melalui koordinasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.</li> <li>2. Menumbuhka kesetiakawan sosial dibidang penyelenggaran usaha kesejahteraan sosial</li> <li>3. Melakukan kajian-kajian model penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial penyajian data informasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial</li> <li>4. Membagun jarangan kemitraan dengan pemerintah , perguruan tinggi,</li> </ol>	

		<p>5. lembaga swasta, dan penyalang dana Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</p>	
	Badan Kepegawai Derah Daerah Istimewa Yogyakarta		
<b>Peran Medis</b>	RS Panti Rapih	<p>Visi: RS Panti Rapih sebagai rumah sakit rujukan yang memandang pasien sebagai sumber inspirasi dan motivasi kerja dengan memberikan pelayanan kepada siapa saja secara profesional dan penuh kasih dalam suasana syukur kepada Tuhan.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RS Panti Rapih menyelenggarakan pelayanan kesehatan menyeluruh secara ramah, adil, profesional, ikhlas dan hormat dalam naungan iman katolik yang gigih membela hak hidup insani dan berpihak kepada yang berkekurangan</li> <li>2. RS Panti Rapih memandang karyawan sebagai mitra karya dengan memberdayakan mereka untuk mendukung kualitas kerja demi kepuasan pasien dan keluarganya, dan dengan mewajibkan diri menyelenggarakan kesejahteraan karyawan secara terbuka, profesional, adil dan merata sesuai dengan perkembangan dan kemampuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi dalam bentuk personal/keluarga</li> <li>2. Pendampingan</li> <li>3. Advokasi</li> <li>4. Layanan Medis</li> <li>5. Shelter</li> </ol>
	PKBI DIY (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)	<p>Visi: Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi (kespro) dan seksual serta hak-hak kespro dan seksual yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan anak dan remaja agar mampu mengambil keputusan dan berperilaku yang bertanggung jawab dalam hal kespro &amp; seksual serta hak-hak kespro &amp; seksual</li> <li>2. Mendorong partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin dan marginal yang tidak terlayani untuk memperoleh akses informasi, pelayanan &amp; hak-hak kespro &amp; seksual yang berkualitas serta berkesetaraan gender</li> <li>3. Berperan aktif mengurangi Prevalensi IMS ( Infeksi Menular Seksual ) dan menanggulangi HIV &amp; AIDS serta mengurangi stigma &amp; diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan orang dengan status AIDS</li> <li>4. Memperjuangkan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan diakui dan dihargai terutama berkaitan dengan berbagai alternatif penanganan KTD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling Remaja</li> <li>2. Pendampingan</li> <li>3. Advokasi</li> <li>4. Medis</li> <li>5. Shelter KTD Remaja</li> </ol>

		<p>5. (Kehamilan yang Tidak Diinginkan)</p> <p>6. Mendapatkan dukungan dari pengambil kebijakan, stake holder, media dan masyarakat terhadap program kespro &amp; seksual serta hak-hak kespro &amp; seksual</p> <p>6. Mempertahankan peran PKBI sebagai LSM pelopor, professional, kredibel, berkelanjutan, dan mandiri dalam bidang kespro &amp; seksual dengan dukungan relawan dan sifat yang professional</p>	
	RSUD Kota Yogyakarta	<p>Visi:</p> <p>Unggul, Pilihan utama masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pelayanan dengan standar profesi tertinggi berbasis keselamatan pasien, sesuai dengan kebutuhan serta menyenangkan pelanggan tanpa diskriminasi</li> <li>2. Mewujudkan organisasi pembelajar, terus-menerus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kinerja pegawai</li> <li>3. Mewujudkan Rumah Sakit Pendidikan, wahana penelitian, pelatihan dan pengembangan serta berwawasan lingkungan</li> <li>4. Mewujudkan manajemen modern, efektif dan efisien dalam iklim kerja serasi, dengan mengutamakan kebersamaan</li> </ol>	Pelayanan Medik
	RSUD Pnembahan Senopati Bantul	<p>Visi:</p> <p>Terwujudnya Rumah Sakit yang unggul dan menjadi pilihan utama masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberika pelayanan prima pada customer</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan ( continuous quality improvement)</li> <li>4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait</li> <li>5. Melengkapi sarana prasarana secara bertahap</li> <li>6. Menyediakan pelayanan pendidikan dan penelitian</li> </ol>	Pelayanan Medis
	RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo	<p>Visi:</p> <p>Rumah Sakit yang unggul dalam pelayanan yang bermutu dan memberi kepuasan kepada pelanggan</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan dan komitmen karyawan</li> <li>2. Meningkatkan manajemen Rumah Sakit yang efektif dan efisien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi dalam bentuk personal/keluarga</li> <li>2. Pendampingan dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi</li> <li>3. Advokasi, dalam bentuk memberikan informasi, membantu</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan</li> <li>4. Melaksanakan pelayanan secara profesional</li> <li>5. Meningkatkan citra Rumah Sakit melalui upaya promosi</li> <li>6. Meningkatkan pengembangan karier SDM dan kesejahteraan karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memperlancar dan menunjuk instansi / lembaga sesuai dengan kebutuhan pasien</li> <li>4. Layanan modif dalam bentuk pemeriksaan, visum, laborat, obat</li> <li>5. Rawat inap : hak kelas perawatan kelas III</li> </ul>
	RSUD Wonosari (Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit pilihan utama, unggul dalam pelayanan, terjangkau oleh semua</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau</li> <li>3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya</li> <li>5. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efektif dan efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan ( promotif, preventif, kuratif, rehabilitative)</li> <li>2. Visum et repertum &amp; visum et repertum psikiatrikum (aspek medico legal)</li> <li>3. Konseling keluarga/personal</li> <li>4. Pendampingan konseling pemberian informasi</li> <li>5. Advokasi : memberikan informasi, merujuk ke instansi lain sesuai kebutuhan</li> </ul>
	RSUD SLEMAN (Rumah Sakit Umum Daerah Sleman)	<p>Visi: Menjadi rumah sakit andalan kabupaten Sleman</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Manyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang memadai</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pengembangan sumberdaya manusia dan upaya pengembangan jejaring pelayanan dan kemitraan</li> </ul>	Layanan medis
	RSJ Grashia DIY	<p>Visi: Menjadi pusat rujukan pertama pelayanan kesehatan jiwa dan napza paripurna yang berkualitas dan beretika</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza paripurna</li> <li>2. Mewujudkan RS sebagai Pusat pembelajaran, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa dan Napza</li> <li>3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas</li> <li>4. Mewujudkan pelayanan yang genetika</li> </ul>	<p>Jenis layanan yang mendukung pelayanan terpadu. Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak DIY antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi</li> <li>2. Pelayanan kesehatan jiwa/ mental</li> <li>3. Pelayanan Korban NAPZA</li> <li>4. Pelayanan pendampingan Napza oleh instansi Keswamas</li> <li>5. Pelayanan pemberdayaan masyarakat oleh instansi Keswamas</li> <li>6. Pembentukan desa siaga sehat jiwa</li> </ul>

	Unit Pelayanan Krisis Terpadu Perempuan dan Anak “Sekar Arum“ RS. Dr. Sardjito Yogyakarta	<p>Visi: Menjadi sahabat bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak</li> <li>2. Menyediakan layanan yang bersahabat, empatik sensitive serta menjamin kerahasiaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan</li> <li>2. Konsultasi psikiatri dan psikologi</li> <li>3. Pembuatan Visum et repertum</li> <li>4. Terapi pasca kekerasan (tumbuh kembang)</li> </ol>
	RS PKU MUhammadiyah Yogyakarta	<p>Visi: Menjadi rumah sakit islam rujukan terpercaya dengan kualitas pelayanan dan pendidikan kesehatan yang islami, aman, profesional, cepat, nyaman, dan bermutu</p> <p>Misi: Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi semua lapisan masyarakat melalui pendekatan, pemeliharaan, pencegahan, pengobatan, pemulihan kesehatan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsltasi pemberian pelayanan/ tindakan medis dan tindak lanjut penanganan</li> <li>2. Pendampingan konseling dan pemberian informasi</li> </ol>
	BAPEL JAMKESOS		Pemeliharaan kesehatan bagi peserta jamkesra
<b>Peran Hukum</b>	Kementerian Hukum dan HAM Kanwil D.I Yogyakarta	<p>Visi: Mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sadar Hukum dan HAM</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembentukan hukum</li> <li>2. Melaksanakan pelayanan Hukum dan HAM</li> <li>3. Melaksanakan penegakan Hukum dan HAM</li> <li>4. Melaksanakan peningkatan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat</li> </ol>	Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yakni pelayanan pengaduan masyarakat yang menangani berbagai permasalahan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik dibidang hak sipil-politik, hak ekonomi sosial budaya maupun hak-hak kelompok rentan
	LBH APIK JOGJA (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)	<p>Visi dan misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya sistem hukum yang adil gender yang tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasipersonal, keluarga, masyarakat dan negara</li> <li>2. Membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses terhadap keadilan</li> <li>3. Memperkuat gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemberdayaan sumber daya hukum guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum serta akan hak dan kewajiban demi terwujudnya masyarakat yang adil gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling</li> <li>2. Pendampingan bantuan hukum</li> <li>3. Advokasi</li> <li>4. Pembahasan kebijakan</li> <li>5. Sosialisasi tentang UU (misalnya : UU PKDRT, UUPA)</li> </ol>
	POLRI	<p>Visi: Memberikan pelayanan, perlindungan bagi perempuan dan anak, korban kekerasan dan memberikan penegakan hukum bagi pelaku</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum</li> <li>2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana</li> <li>3. Penyelenggaraan kerja sama dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan hukum</li> <li>2. Konseling/Konsultasi</li> </ol>

		koordinasi dengan instansi terkait	
	PTA ( Pengadilan Tinggi Agama) Yogyakarta	<p>Visi: Terwujudnya Pengadilan tinggi Agama Yogyakarta yang Luhur, Bermartabat dan berwibawa</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kredibilitas aparat penegak hukum</li> <li>2. Meningkatkan moral aparatur Pengadilan Agama</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>4. Meningkatkan manajemen peradilan agama yang modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan</li> <li>5. Meningkatkan pengawasan aparatur pengadilan agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkawinan</li> <li>2. Waris</li> <li>3. Wasiat</li> <li>4. Hibah</li> <li>5. Wakaf</li> <li>6. Zakat</li> <li>1. Infaq</li> <li>2. Shadaqah dan</li> <li>3. Ekonomi syariah</li> </ol>
	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY		
	Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY)		Korban KDRT dapat memperoleh informasi tentang proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan. Sejauh mana perkara tersebut berlangsung dapat diawasi oleh masyarakat untuk mengawal proses hukum.
Peran Ekonomi	DISNAKERTRANS DIY	<p>Visi: terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dalam rangka perluasan dan penempatan tenaga kerja, sejahtera, dan terlindungi dalam hubungan industrial yang mantap dan dinamis serta terwujudnya mobilitas penduduk yang produktif dan mandiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan rumah tangga Instansi dalam mendukung pelayanan masyarakat dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi</li> <li>2. Pengembangan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>3. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, penempatan kerja, kewirausahaan dan transmigrasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui meningkatkan produktivitas</li> <li>5. Memfasilitasi penyiapan tenaga kerjaampil yang kompeten untuk memasuki pasar kerja baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya pencegahan dalam bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak antara lain melalui sosialisasi/ bimbingan teknis norma ketenagakerjaan (pencegahan kekerasan)</li> <li>2. Pelatihan kewirausahaan</li> </ol>

		<p>6. Meningkatkan perlindungan, pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan melalui melalui hubungan industrial yang harmonis dan dinamis</p> <p>7. Mengarahkan mobilitas penduduk yang terencana dan teratur melalui peningkatan kerjasama antar daerah</p> <p>8. Mengukurkan pemberdayaan daerah kawasan transmigrasi melalui penataan wilayah yang berwawasan lingkungan cepat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat.</p>	
	Yayasan Anisa swasti (YASANTI)	<p>Visi: terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis bebas dari ketidakadilan gender, mempunyai kesempatan dan kemampuan dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan organisasi perempuan yang independen dan demokratis</li> <li>2. Mengembangkan kesadaran kritis buruh perempuan melalui pendidikan dan advokasi</li> <li>3. Menguatkan hak-hak ekonomi perempuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpustakaan</li> <li>2. Pendidikan dan pelatihan</li> <li>3. Penguatan jaringan</li> </ol>
	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (TP PKK) DIY	<p>Visi: terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlaq mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.</p> <p>Misi: meningkatkan mental spiritual perilaku kehidupan dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan HAM, demokrasi meningkatkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan pembentukan watak bangsa yang serasi selaras dan seimbang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pencegahan terjadinya korban kekerasaan perempuan dan anak yang dilakukan secara berjejaring, mulai dari TP-PKK Kab/Kota, TP-PKK kec. Sampai pada kelompok dasawisma</li> <li>2. Menerima laporan dan menindak lanjuti dengan berkoordinasi atau menyampaikan kepada pihak berwenang untuk menangani.</li> </ol>
	Dinas Pendapatan pengelola Keuangan dan Aset DIY		
	BP3TKI Yogyakarta	<p>Visi:</p> <p>Terwujudnya TKI yang berkualitas dan martabat</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan kesempatan kerja bagi TKI di Luar Negeri seluas-luasnya dengan ketrampilan yang memadai</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI</li> <li>3. Meningkatkan perlindungan pengamanan dan pemberdayaan TKI</li> <li>4. Memfasilitasi penempatan dan perlindungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelesaian kasus TKI</li> <li>2. Penanganan TKI sakit</li> <li>3. Penanganan dan pemulangan TKI bermasalah</li> <li>4. Pemulangan jenazah TKI</li> <li>5. Pemberian edukasi perbankkan kepada calon TKI dan keluarga TKI</li> </ol>

			6. Pemberdayaan TKI purna
--	--	--	---------------------------

*Sumber: Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) DIY tahun 2013*

Gambar 1 Gedung FPKK





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
JL. Marsda Adisucipto Telp. (0274)585300; Fax. (0274)519571  
Yogyakarta 55281



### BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

N a m a : Fita Khoirul Umami

N I M : 10720032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Prodi : Sosiologi

Semester : VII (Tujuh)

Tahun Akademik : 2012/2013

Telah mengikuti Seminar Proposal Skripsi tanggal : 17 Januari 2014

J u d u l : *PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*

Rekomendasi/Perbaikan Perubahan Judul : .....

.....  
Yogyakarta, 17 Januari 2014

Mengetahui:

A.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua

Drs.H. Oman Fathurohman SW,M.Ag  
NIP.19570302 198503 1002

Muryanti, M.Si.  
NIP. 19800829 200901 2 005



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/632/1/2014

Membaca Surat	: KABAG. TU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	Nomor	: UIN.02/TU.SH/TL.00/0120/2014
Tanggal	: 27 JANUARI 2014	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: FITA KHOIRUL UMAMI	NIP/NIM : 10720032
Alamat	: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, SOSIOLOGI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
Judul	: PERAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
Lokasi	: KA. KANTOR FPK2PA DI BPPM YOGYAKARTA	
Waktu	: 30 JANUARI 2014 s/d 30 APRIL 2014	

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 JANUARI 2014

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Pererekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Penanda Susilowati, SH

18580120 198503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KA. KANTOR FPK2PA DI BPPM YOGYAKARTA
3. KABAG. TU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN